

Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula

Muhammad Wahyu Kuncoro
Mahasiswa Program Doktor Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
wahyu.kuncoro.m@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penggunaan media sosial (*Social media used*) terhadap kepercayaan (*trust*) dan partisipasi politik (*political participation*) pada pemilih pemula. Luaran dari penelitian ini adalah sebuah model yang mengasosiasikan variabel-variabel penggunaan media sosial, kepercayaan dan partisipasi politik pada pemilih pemula. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa model yang diajukan mendapat dukungan data empirik dari lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Jumlah responden penelitian sebanyak 150 mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini : skala penggunaan media sosial, skala kepercayaan, dan skala partisipasi politik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis model persamaan struktural (*Structural Equation Model - SEM*). Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis terbukti.

Kata kunci: Media sosial, trust, partisipasi politik

Pendahuluan

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas (www.kpu.go.id)

Partisipasi politik diakui sebagai elemen inti dari demokrasi, sehingga menjadikan partisipasi sebagai sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi politik berkaitan dengan kebebasan warga dalam menggunakan hak politiknya. Wujud partisipasi politik tidaklah tunggal tetapi beragam mulai dari protes, a-politik, golongan putih (golput), memilih (voting), dan beragam bentuk lainnya (www.kpud-tasikmalayakab.go.id)

Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data KPU Pusat, partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres 2014 sebesar 69,58 persen, menurun dibandingkan Pilpres 2009 dengan tingkat partisipasi sebesar 71,17 persen. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11 persen, dan pemilu legislatif 2009 sebesar 71% (www.kpu.go.id).

Remaja dan Partisipasi Politik

Saat ini, remaja lebih banyak menghabiskan waktu untuk online dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukanlah hal yang mengejutkan, khususnya diantara remaja, internet telah menjadi tempat untuk mengekspresikan pandangan politik (opinion politik), untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu politik dan secara umum untuk menyampaikan dan mempengaruhi isu-isu publik. Sebagai contoh Smith (Kim et al., 2016) melaporkan bahwa pada tahun 2012, 2/3 remaja di Amerika usia 18-24 tahun bergabung di dalam beberapa jaringan sosial terkait dengan aktivitas politik, sementara hanya 13% dari jumlah warga yang berusia lebih dari 65 tahun yang bergabung dalam aktivitas ini.

Perbandingan jumlah remaja yang bergabung dalam aktivitas politik online sangat berbeda dibanding ada tahun 2008, dimana kurang dari 2/3-nya. Sehingga remaja menunjukkan

lebih aktif dalam aktivitas politik secara online dari pada orang tua, dan saat ini lebih aktif dibandingkan tahun sebelumnya (Kim et al., 2016).

Peningkatan popularitas riset terhadap remaja dalam partisipasi politik pada saat ini didasarkan pada 2 fenomena, yaitu : orang-orang muda mendapatkan sedikit dan sedikit berkaitan dengan urusan politik dan mereka adalah pengguna internet aktif dibandingkan kelompok usia yang lain. Hal ini telah menciptakan harapan bahwa partisipasi politik online memainkan peran penting dalam peningkatan partisipasi diantara orang-orang muda.

Partisipasi politik

Secara konvensional partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintah, pemilihan wakil, dan kebijakan (Putnam, 1995). Sedangkan partisipasi politik online didefinisikan dengan cara yang sama seperti partisipasi konvensional namun aktivitas-aktivitasnya dilakukan dalam konteks online (Verba, dkk, 1995).

Pengertian lain yang juga sering dikutip adalah partisipasi sebagai tindakan warga di mana mereka berusaha mempengaruhi atau mendukung pemerintahan dan politik atau semua kegiatan warga secara sukarela untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pilihan politik pada berbagai tingkat pada sistem politik (Milbrath & Goel, 1977).

Bentuk-bentuk partisipasi politik

Partisipasi politik berkaitan dengan kebebasan warga dalam menggunakan hak politiknya. Wujud partisipasi politik tidaklah tunggal tetapi beragam mulai dari protes, a-politik, golongan putih (golput), memilih (voting), dan beragam bentuk lainnya.

Huntington & Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, membangun jaringan dan tindakan kekerasan. Sedangkan Magstadt (2012) menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: (1) Opini publik; (2) Polling; (3) Pemilihan umum; dan (4) Demokrasi langsung.

Verba, dkk lebih menekankan bahwa partisipasi politik ditunjukkan hanya untuk mempengaruhi sistem politik, seperti voting, kampanye, berhubungan dengan pejabat pemerintah, menghadiri pertemuan politik, protes dan aktivitas politik. Hal tersebut lebih ditekankan dalam konteks aktivitas dari pada menjadi perhatian pada politik (Cohen, et al, 2001). Secara konvensional, partisipasi politik merujuk pada partisipasi warga negara dalam aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintahan, pemilihan wakil rakyat (*official*) dan kebijakan (Putnam, 1995).

Teorell et al. (2007) menyarankan bahwa studi partisipasi elektoral perlu diperluas dimensinya menjadi lima dimensi, yaitu: 1) partisipasi pemilu itu sendiri, 2) partisipasi konsumen yang meliputi antara lain kegiatan menyumbang uang untuk amal, memboikot dan konsumsi politik, serta penandatanganan petisi, 3) kegiatan, seperti menjadi anggota partai, aktif dalam pekerjaan sukarela untuk/atau menyumbangkan uang kepada partai politik, 4) protes yang meliputi tindakan seperti pengambilan bagian dalam demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes lainnya, dan 5) aktivitas kontak seperti menghubungi organisasi, politisi atau PNS.

Welch (1977) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat diungkap melalui 2 bentuk partisipasi, yaitu : 1) voting dan kampanye yaitu kegiatan aktif seperti voting, mempengaruhi orang lain, menulis surat pada politisi, menyumbang dana, pertemuan politik, anggota klub politik dan 2) aktivitas yang bersifat pasif (menonton) perasaan tertarik, membaca koran, mendengar radio, menonton tv, dan membaca majalah.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik

1. Jenis Kelamin

Menurut Welch (1977) salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah perbedaan jenis kelamin yang dimoderatori oleh perbedaan aspek-aspek struktural dan situasional. Aspek struktural meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan (income) dan wilayah, sedangkan aspek situasional meliputi status perkawinan, jumlah anak kecil dan bekerja di luar kota.

2. Status Sosial

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial sebagai prediktor yang konsisten terhadap partisipasi politik. Individu dengan status sosial yang tinggi akan lebih mungkin melakukan dalam aktivitas politik dibandingkan yang berstatus rendah (Milbrath & Goel, 1977). Aktivitas yang tinggi terkait dengan tuntutan yang bersifat individual, seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi akan merasa bertanggung jawab terhadap tuntutan tersebut sehingga ia akan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung aktivitas tersebut.

Verba & Nie (dalam Huckfeldt, 1979) menjelaskan kaitan antara status sosial yang tinggi dengan tingkat partisipasi politik : 1) lingkungan sosial memberi dorongan kepada individu untuk berpartisipasi, 2) sumber daya dan ketrampilan individu seperti waktu, uang dan pengetahuan, dan 3) karakteristik psikologis, seperti kesadaran dan efikasi politik. Dorongan dari lingkungan sosial adalah faktor yang bersifat eksternal, dimana melalui norma-norma sosial yang ada dapat mendorong individu untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian dari sebuah tanggung jawab sosial, sedangkan sumber daya dan karakteristik psikologis lebih bersifat internal.

3. Kepercayaan, keyakinan, investasi, dan alternatif

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dapat dijelaskan berdasarkan pendekatan teori pertukaran (*exchange*), yaitu meliputi faktor – faktor : kepercayaan (*trust*), keyakinan (*efficacy*), investasi, dan alternatif (Farrell & Petersen, 1982). Seseorang yang telah banyak memberikan investasinya kepada sebuah organisasi yang berupa investasi ketrampilan dan pengetahuan akan cenderung lebih merasa bergantung pada organisasi dan mengikuti aktivitas-aktivitas yang legitimate, sedangkan mereka yang rendah investasinya cenderung tidak akan merasa kehilangan, apabila harus menanggung resiko setelah mengikuti kegiatan politik yang tidak sah (*illegitimate*).

Ketersediaan alternatif juga akan mempengaruhi bentuk perilaku politik, seorang anggota yang tidak puas dengan organisasinya, namun tidak memiliki pilihan lain untuk keluar atau pindah ke tempat lain, maka cenderung akan memilih cara protes yang mengarah internal. Kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap organisasi akan cenderung meningkatkan aktivitas organisasi karena mereka percaya bahwa apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil yang diharapkan. Efikasi (*efficacy*) adalah persepsi untuk mampu mempengaruhi, seseorang yang merasa yakin bahwa aktivitas-aktivitas politiknya akan memberikan keuntungan baginya, maka cenderung akan lebih tinggi keterlibatannya dalam berbagai kegiatan organisasi.

Hasil studi yang dilakukan oleh Anderson (2010) tentang model partisipasi politik menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu : efikasi politik internal (*internal political efficacy*) , kepercayaan personal (*personal trust*), dan *sense of community*. Pada model ini dijelaskan bahwa *sense of community* memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi politik atau melalui efikasi politik internal atau melalui kepercayaan personal, sedangkan efikasi politik internal dan kepercayaan personal berperan secara langsung terhadap partisipasi politik.

4. Faktor lingkungan

Peranan faktor lingkungan terhadap partisipasi politik khususnya faktor orang tua dan sekolah diungkap oleh Chansilp (1994). Hasil studinya menunjukkan bahwa keterlibatan aktivitas orang tua dalam kegiatan politik dan organisasi turut menyumbang pada tingkat partisipasi politik anak setelah masa dewasa awal. Demikian pula, keterlibatan remaja dalam kegiatan-kegiatan di sekolah juga mempengaruhi terhadap partisipasi politik pada dewasa awal.

5. Teknologi

Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara manusia berinteraksi, pembicaraan warga negara secara online atau ekspresi politik dapat menjadi prediktor partisipasi politik baik secara online maupun offline. Penggunaan *chatroom* dan komunikasi berbasis internet memiliki potensi yang besar untuk pengayaan proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi. Sebagai contoh adalah pengguna media sosial untuk tujuan politik di AS dan Non-AS memiliki pengaruh yang signifikan pada partisipasi politik offline seperti keterlibatan politik dalam sebuah kegiatan politik, kecenderungan dan perilaku voting (Scheufele & Nisbet, 2002; Bode, dkk dalam Yang & DeHart, 2016)

6. Sosialisasi

Menurut Herbert Hyman (dalam Merelman, 1972) sosialisasi politik adalah salah satu segi dari struktur sosial. Sosialisasi politik adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam masyarakat karena ini sebagai cara dimana nilai-nilai politik dapat tetap terpelihara dari generasi ke generasi.

Menurut Hyman terdapat dua fondasi utama dalam sosialisasi, yaitu : 1) sosialisasi harus diyakini sebagai proses dimana institusi menanamkan nilai-nilai politik dari pada sekedar proses belajar dimana masing-masing individu mengembangkan orientasi politiknya sendiri-sendiri; 2) hal ini karena institusi sosial dan agen-agensya berubah lebih lambat dari pada perubahan secara individual, sosialisasi politik adalah sebuah keharusan sebagai pengendali atas perubahan politik. Dengan kata lain, sifat mudah terpengaruhnya anak-anak dan institusi sosial yang relatif stabil menjadikan sosialisasi politik sebagai pemelihara kekuatan politik (Merelman, 1972).

Sosial media, Kepercayaan (trust), dan Partisipasi Politik

Sejak dikenalkan internet sebagai media yang dapat digunakan untuk publikasi masa dan menyediakan fasilitas untuk melakukan komunikasi yang interaktif, maka internet memberi kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Internet menyediakan kesempatan bagi keterikatan politik (*political engagement*) yang tidak tersedia pada masa sebelumnya. Terkait dengan tingkat keterikatan politik, bahwa internet meningkatkan bentuk partisipasi politik yang berbentuk offline maupun online (Oser et al, 2013).

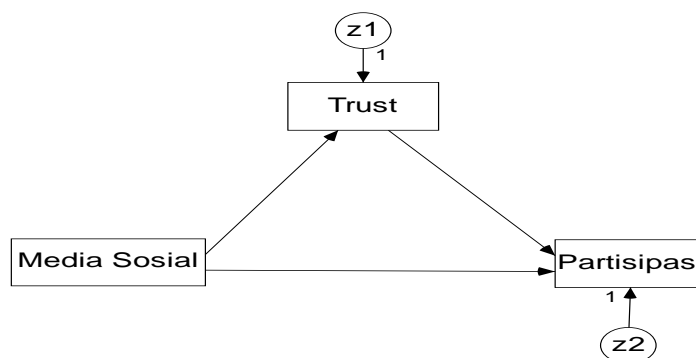
Hasil studi Bode, dkk (dalam Yang & DeHart, 2016) menunjukkan bahwa pembicaraan warga negara secara online atau ekspresi politik dapat menjadi prediktor partisipasi politik baik secara online maupun offline. Sebagai contoh adalah pengguna media sosial untuk tujuan politik di AS dan Non-AS memiliki pengaruh yang signifikan pada partisipasi politik offline seperti keterlibatan politik dalam sebuah kegiatan politik, kecenderungan dan perilaku voting.

Penggunaan *chatroom* dan komunikasi berbasis internet memiliki potensi yang besar untuk pengayaan proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi (Scheufele & Nisbet, 2002).

Menurut Eveland & Scheufele (2000), bahwa dalam beberapa kesempatan mengakses berbagai media berita justru memiliki korelasi negatif terhadap perilaku berpolitik, hal ini karena mereka justru sering mendapatkan berita atau informasi tentang praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang terkait.

Kepercayaan (trust) merupakan bagian dari sosial kapital yang dapat menguatkan kemampuan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (*collective problems*) secara efisien, serta meningkatkan ikatan sosial.

Berdasarkan dinamika di atas, maka peneliti mengusulkan sebuah model sebagai berikut :



Gambar 1

Model partisipasi politik yang diusulkan

Hipotesis yang diajukan adalah model partisipasi politik yang diajukan mendapat dukungan dari data lapangan.

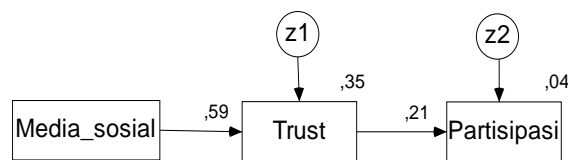
Metode

Variabel penelitian yang diungkap pada penelitian ini adalah : Penggunaan media sosial, trust , dan partisipasi politik. Subjek penelitian adalah mahasiswa pemilih pemula yang telah berhak memberikan hak politik, yang berdomisili di Yogyakarta. Jumlah subyek penelitian sebanyak 150 mahasiswa. Lokasi penelitian adalah di Yogyakarta.

Pengukuran variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut : Partisipasi politik diungkap menggunakan pertanyaan yang mengungkap partisipasi politik yang bersifat online dan offline. Penggunaan media sosial diungkap menggunakan skala penggunaan media sosial dan kepercayaan diungkap menggunakan skala kepercayaan.

Hasil

Hasil uji model *partisipasi politik* sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya untuk mendapatkan nilai chi square (χ^2) minimum dan nilai p yang maksimum dengan harapan diperoleh model yang fit (tidak berbeda dengan data dilapangan). Akhirnya diperoleh model sebagaimana tertera pada gambar 1 berikut.:



chi-squares=1,749

df=1

prob=,186

cmin/df=1,749

gfi=,992

agfi=,954

tli=,968

rmsea=,071

cfi=,989

Gambar 2
Model partisipasi politik

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Amos 16.0.0, diperoleh: $\chi^2 = 1.749$ ($p > 0,05$); GFI =0,992; RMSEA = 0,071. Parameter tersebut menunjukkan bahwa model tersebut fit.

Diskusi

Berdasarkan model yang diperoleh tersebut di atas, variable media sosial memberikan sumbangan positif terhadap variabel kepercayaan. Penggunaan blog, situs jaringan sosial untuk berkomunikasi secara online dan ekspresi komunikatif (Ellison et al., 2007; Walther et al., 2009), dapat membentuk sikap dan meningkatkan pengetahuan terkait hal yang dibicarakan (Huckfeldt and Sprague, 1995). Menurut Eveland Scheufele (2000), bahwa dalam beberapa kesempatan mengakses berbagai media berita dapat memiliki **korelasi negatif** terhadap perilaku berpolitik, hal ini karena mereka justru sering mendapatkan berita atau informasi tentang praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa informasi

yang diperoleh juga dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang terkait.

Variabel kepercayaan memberi sumbangan positif terhadap partisipasi politik. Menurut Farrel & Peterson (1982) variabel kepercayaan (*trust*) berperan positif dalam meningkatkan partisipasi politik. Variabel media sosial tidak memberikan sumbangan secara langsung terhadap partisipasi politik. Variabel media sosial memiliki sumbangan terhadap partisipasi politik melalui variabel kepercayaan (*trust*). Beberapa riset sebelumnya menunjukkan penggunaan media berpengaruh secara tidak langsung terhadap partisipasi warga negara melalui variabel mediator seperti political political efficacy (e.g., Jung et al., 2011; Shah et al., 2005).

Kesimpulan

Model partisipasi politik yang sesuai dengan kondisi lapangan adalah model yang menjelaskan bahwa variabel penggunaan media sosial memiliki peranan terhadap partisipasi politik melalui variabel kepercayaan (*trust*) sebagai variabel mediator. Sedangkan variabel kepercayaan (*trust*) memiliki peranan langsung terhadap partisipasi politik.

Kepustakaan

- Anderson, M. R. (2010). Community psychology, political efficacy, and trust. *Political Psychology*, 31(1), 59-84.
- Chansilp, V. (1994). *Participation in student government and students' sense of political efficacy of four Thai high schools*.
- Ellison, N.B., Steinfield, C., Lampe, C., (2007). The benefits of Facebook "friends": social capital and college students' use of online social network sites. *J. Comput. Mediat. Commun.* 12, 1143–1168
- Eveland, W. P., and D. A. Scheufele. (2000) "Connecting News Media Use with Gaps in Knowledge and Participation." *Political Communication* 17 215-37.
- Farrell, D., & Petersen, J. C. (1982). Patterns of political behavior in organization. *Academy of Management Review*, 7(3), 403-412.
- Huckfeldt, R. R. (1979). Political participation and the neighborhood social context. *American Journal of Political Science*, 579-592.
- Huckfeldt, R., & Sprague, J. (1995). *Citizens, politics, and social communication*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Huntington, S.P. & Joan Nelson, J. (1990). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 9-10.
- Jung, N., Kim, Y., & Gil de Zúñiga, H. (2011). The mediating role of knowledge and efficacy in the effects of communication on political participation. *Mass Communication & Society*, 14, 407–430.
- Kim, Y., Russo, S., & Amnå, E. (2016). The longitudinal relation between online and offline political participation among youth at two different developmental stages. <http://doi.org/10.1177/1461444815624181>
- Merelman, R. M. (1972). The Adolescence of Political Socialization Author (s): Richard M . Merelman Source : *Sociology of Education* , Vol . 45 , No . 2 (Spring , 1972), pp . 134-166 Published by : American Sociological Association Stable URL : [http://www.jstor.org/stable/211, 45\(2\), 134–166](http://www.jstor.org/stable/211, 45(2), 134–166).
- Magstadt, T.M. (2012). *Understanding Politics* (Belmont: Cengage Learning) pp. 273-82.
- Milbrath, L. W. & Goel, L. (1977). *Political participation. How and Why People Get Involved in Politics* Chicago: Rand McNally.
- Oser, J., Hooghe, M., & Marien, S. (2013). Is Online Participation Distinct from Offline Participation? A Latent Class Analysis of Participation Types and Their Stratification. *Political Research Quarterly*, 66(1), 91-101
- Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in American youth, 1976–1995. *Political Science and Politics*, 28, 664–683

- Scheufele, D. A., & Nisbet, M. C. (2002). Being a citizen online new opportunities and dead ends. *The Harvard International Journal of Press/Politics*, 7(3), 55-75.
- Shah, D.V., Cho, J., Eveland, W.P., Kwak, N., (2005). Information and expression in a digital age: modeling Internet effects on civic participation. *Commun. Res.* 32, 531–565
- Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J. R. (2007). 13 Political participation. *Citizenship and involvement in European democracies: A comparative analysis*, 334.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Walther, J.B., Van Der Heide, B., Hamel, L., Shulman, H., (2009). Self-generated versus other-generated statements and impressions in computer-mediated communication: a test of warranting theory using Facebook. *Commun. Res.* 36, 229–253.
- Welch, S. (1977). Women as political animals? A test of some explanations for male-female political participation differences. *American Journal of Political Science*, 711-730.
- Www. kpu.go.id
- Www.kpud-tasikmalayakab.go.id
- Yang, H.C. & DeHart, J. L. (2016). Social Media Use and Online Political Participation Among College Students During the US Election 2012. *Social Media+ Society*, 2(1), 2056305115623802.

